

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alfitra. Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana Perdata dan korupsi di indonesia.(Jakarta: Raih Asas Sukses:2011).
- Effendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. (Malang; Setara Press.2014).
- Gunardi. Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum. (Jakarta : UPT penerbit universitas Tarumanagara.1996).
- Hadi, Sutrisno. Metode Research II. (Yogyakarta:Andi Ofset.2004.)
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta:Sinar Grafika.2002).
- Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan) Edisi ke dua. cetakan kesembilan.(Jakarta : Sinar grafika.2007).
- Hiariej,Eddy.O.S. Teori dan Huku Pembuktian. (Jakarta : Erlangga, 2012).
- Ibrahin, Johnny Ibrahin. Teori dan Metodologi penelitian hukum normative. (Jakarta:Banyumedia.2005).
- Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung:Sinar Baru.1983)
- Lubis,M. Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian. (Bandung: Mandar maju. 1994).
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta:Liberty.2005).

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. (Yogyakarta : liberty.1991).

Moerad, Potang B.M. Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana. (Bandung:Alumnia.2005).

Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung ; Citra Aditya Bakti.2007).

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.(Semarang :Undip.1998).

Purbacaraka, purnadi dan Soerjono Soekanto. Ikhtisari Antinomi Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum. (Jakarta : Rajawali Pers.1991).

Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim. (Jakarta:Sinar Grafika.2011).

Rukmini, Mien. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia. (Bandung; PT Alumni.2003).

Samosir, C.Dijisman. Hukum Acara Pidana. (Bandung:Nuansa Aulia.2018)

Sastrawidjaja, Sofyan. Hukum Pidana 1. (CV.Armico.1990).

Sidharta, B. Arief dan Meuwissen. Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. (Bandung: Refika Aditama.2007).

Simorangkir, J.C.T. Kamus Hukum .(Jakarta:Aksara Baru.1981).

Soekano, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta:Universitas Indonesia.1984).

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. *Suatu Tinjauan Singkat.*(Jakarta: Rajawali Pers.2001).
- Soekanto,Soerjono. *Ringkasan Metodologi Hukum Empiris.* (Jakarta : Ind. Hill-Co .1990).
- Sofyan,Andi Muhammad, Abd Asis, dan H, Amir Illyas. Hukum Acara Pidana : Edisi Ketiga (Jakarta:Kencana.2014).
- Sofyan,Andi. Hukum Acara Pidana suatu pengantar.(Yogyakarta:Rangka education.2013).
- Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita. 2010).
- Subekti. Kamus Hukum. (Jakarta : Pradnya Paramita. 2003).
- Sumaryono,E. Etika dan Hukum: Relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas. (Yogyakarta: Kanisus. 2002).
- Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum(Upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan). (Yogyakarta:UIN Press.2015).
- Tahir, Heri. Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. (Yogyakarta ; LaksBang Pressindo.2010)
- Ujan, Andre Ata. Keadilan dan Demokrasi, telaah Filsafat Politik John Rawl.(Yogyakarta: Kanisius. 2001).
- Wignjodipuro, Surojo. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta:Gunung Agung.1982).

2. Artikel Ilmiah

Alamri, hadi. “kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti menurut kitab undang-undang hukum acara pidana”. Edisi No.1 Tahun 2017.

Dewi, Komang ayu trisna cahya, ni nengah adiryani. “kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana indoensia”. Edisi No.8 Tahun 2017.

Iswanto, Agung. “keabsahan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di indonesia”. Edisi no.1 tahun 2016.

Rosana, Ellya. “Hukum dan Perkembangan Masyarakat”. Edisi No.1 Tahun 2003.

3. Peraturan PerUndang - Undang

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang acara pidana

_____,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan

_____,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

_____,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

_____,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta

_____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

_____.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016